



KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

Nomor : 900/1.a/Cat. 2/ Kesbangpol / I / 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk pegawai sebagai Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pengelola Keuangan Daerah APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/532/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/564/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai Tugas Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/607/BKAD/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Pengajuan Usul Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan untuk Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk para pejabat yang disertai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK OPD yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan/tugas seperti tersebut dalam lajur 4 lampiran 1 Keputusan ini.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang namanya tersebut dalam lajur 3 dengan uraian program/kegiatan yang dikelola seperti tersebut dalam lajur 5 dengan jumlah anggaran seperti tersebut dalam lajur 6 lampiran 2 Keputusan ini.

- Kedua : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c. Melakukan verifikasi SPP.
 - d. Menyiapkan SPM.
 - e. Melakukan verifikasi atas penerimaan/pengeluaran OPD.
 - f. Melaksanakan Akuntansi OPD.
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melapor perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen pengeluaran kegiatan antara lain :
 - Membantu menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa.
 - Membantu menyusun paket pekerjaan yang akan dilelang, penunjukan langsung, pengadaan langsung.
 - Membantu menyiapkan kontrak/perjanjian.
 - Membantu menyiapkan laporan pengadaan barang dan jasa.
 - Membantu proses penyerahan aset hasil pengadaan barang dan jasa.
 - d. Menyiapkan dokumen Gaji dan lainnya.

Ketiga : Pengeluaran akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 melalui Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kode Rekening 8.01.01.1.02), Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kode Rekening 8.01.01.1.02.03)

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : _____

Plt. KEPALA BADAN,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

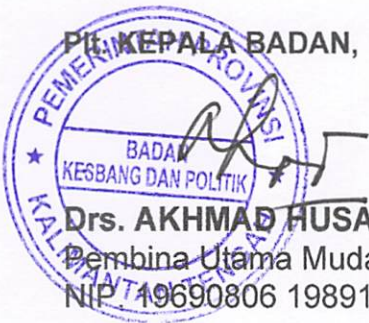
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng di Palangka Raya;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng di Palangka Raya;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kalteng di Palangka Raya;
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng di Palangka Raya;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Nama / NIP	Jabatan dalam OPD / Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	FAJAR SRININGSIH, S.Sos., M.Si NIP. 19850101 200903 2 001	Sekretaris / Penata Tk. I / III/d	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	

PI. KEPALA BADAN,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	AWUNG WIDARTA, SE 19810509 201402 1 002 Penata (III/c)	SEKRETARIAT Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	8.01.01. 8.01.01.1.05 8.01.01.1.05.01 8.01.01.1.05.02 8.01.01.1.05.03 8.01.01.1.05.05 8.01.01.1.05.06 8.01.01.1.05.07 8.01.01.1.06 8.01.01.1.06.01 8.01.01.1.06.02 8.01.01.1.06.05 8.01.01.1.06.06 8.01.01.1.06.09	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1). Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3). Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4). Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 5). Pemulangan Pegawai yang Pensiun 6). Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	 121.165.000,- 3.960.000,- 80.705.000,- 4.000.000,- 2.500.000,- 20.000.000,- 10.000.000,- 775.480.380,- 170.546.000,- 31.226.000,- 31.131.620,- 10.162.000,- 532.414.760,-	 Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.01.1.07	3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.464.862.979,-		
				8.01.01.1.07.01	1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.248.472.000,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.07.10	2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.216.390.979,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.08	4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.975.238,-		
				8.01.01.1.08.01	1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.9200.000,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.08.02	2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.339.538,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.08.04	3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	796.715.700,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.09	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.323.513.280,-		
				8.01.01.1.09.01	1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.360.000,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.09.09	2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.076.803.280,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.09.10	3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.830.000,-	Palangka Raya	
				8.01.01.1.09.11	4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.520.000,-	Palangka Raya	
					JUMLAH	5.684.996.877,-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUWARTO 19650207 198709 1 002 Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIAT Kasubag Umum dan Kepegawaian	8.01.01. 8.01.01.1.07 8.01.01.1.07.10	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Kursi Aula JUMLAH	198.000.000,- 198.000.000,- 198.000.000,-	Palangka Raya	
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SANTI CHANDRA HERTIANA, S.Sos 19801007 200801 2 021 Penata Muda Tk. I (III/b)	SEKRETARIAT Pengolah Data Keuangan	8.01.01. 8.01.01.1.02 8.01.01.1.02.01 8.01.01.1.02.03 8.01.01.1.02.04 8.01.01.1.02.05 8.01.01.1.02.06 8.01.01.1.02.07 8.01.01.1.03 8.01.01.1.03.06	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD JUMLAH	5.242.506.432,- 5.066.800.432,- 160.455.800,- 2.500.000,- 4.014.200,- 5.000.000,- 3.736.000,- 17.751.600,- 17.751.600,- 5.260.258.032,-	Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	DWI HADI SUCIPTO, A.Md 19840904 201001 1 005 Penata Muda (III/a)	BIDANG KIB Pengolah Data Sub Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	8.01.02. 8.01.02.1.01 8.01.02.1.01.01 8.01.02.1.01.02 8.01.02.1.01.03 8.01.02.1.01.04 8.01.02.1.01.05	A. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1). Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5). Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.569.914.900,- 30.000.000,- 280.000.000,- 750.000.000 1.100.000.000,- 250.000.000,-	 Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.02.1.01.06	6). Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berangsa dan Bernegara JUMLAH	159.914.900,- 2.569.914.900,-	Palangka Raya	
6.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	ERWIN ROBERTA, SE 19800314 200604 1 007 Penata (III/c)	BIDANG POLDAGRI Analisis Kebijakan Ahli Muda	8.01.03. 8.01.03.1.01 8.01.03.1.01.01	A. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1). Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	7.009.143.400,- 283.906.000,-	Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.03.1.01.02	2). Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	100.000.000,-	Palangka Raya	
				8.01.03.1.01.03	3). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	317.100.000,-	Palangka Raya	
				8.01.03.1.01.04	4). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	6.025.178.900,-	Palangka Raya	
				8.01.03.1.01.05	5). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	282.958.500,-	Palangka Raya	
					JUMLAH	7.009.143.400,-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	YOHANNI E. JOHANNIS, ST 19870218 200903 2 002 Penata Tk. I (III/d)	BIDANG KETA- HANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI Analisis Kebijakan Ahli Muda	8.01.04. 8.01.04.1.01 8.01.04.1.01 8.01.04.1.02 8.01.04.1.03 8.01.04.1.04	A. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1). Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 2). Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 3). Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 4). Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	3.263.514.000,- 100.000.000 2.765.000.000,- 100.000.000,- 198.514.000,-	 Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.04.1.05	5). Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	100.000.000,-	Palangka Raya	
				8.01.05.	B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			
				8.01.05.1.01	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.662.060.250,-		
				8.01.05.1.01.01	1). Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	200.000.000	Palangka Raya	
				8.01.05.1.01.03	2). Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	100.000.000,-	Palangka Raya	
				8.01.05.1.01.03	3). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	1.192.894.250	Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.05.1.01.04	4). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	100.000.000,-	Palangka Raya	
				8.01.05.1.01.05	5). Pelaksanaan Monitoring, EValuasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	69.166.000,-	Palangka Raya	
					JUMLAH A + B	4.925.574.250,-		
8.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	FENI CATRIANI UTAMI, SH 19870221 201101 2 002 Penata (III/c)	BIDANG PENANGAN- AN KONFLIK DAN KEWASPDAAN NASIONAL Analisis Kebijakan Ahli Muda	8.01.06. 8.01.06.1.01 8.01.06.1.01.01	A. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1). Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	2.411.546.100,- 100.000.000,-	Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.06.1.01.02	2). Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	117.762.000,-	Palangka Raya	
				8.01.06.1.01.03	3). Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	465.961.000,-	Palangka Raya	
				8.01.06.1.01.04	4). Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	661.499.100,-	Palangka Raya	
				8.01.06.1.01.05	5). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	365.533.000,-	Palangka Raya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.01.06.1.01.06	5). Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	700.791.000,-	Palangka Raya	
					JUMLAH	2.411.546.100,-		
					TOTAL ANGGARAN	28.309.433.559,-		
					Terbilang : Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)			

PIK KEPALA BADAN,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002